

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Di dalam akuntansi keuangan dikenal adanya standar yang harus dipatuhi dalam pembuatan laporan keuangan. Standar tersebut diperlukan karena banyaknya pengguna laporan keuangan. Jika tidak terdapat standar, perusahaan dapat saja menyajikan laporan keuangan yang mereka miliki sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Hal ini tentunya akan menjadi masalah bagi para pengguna laporan keuangan karena akan menyulitkan untuk memahami laporan keuangan yang ada.

Setiap negara mempunyai aturan akuntansi (standar) yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain kondisi ekonomi, paham ekonomi yang dianut, serta perbedaan kondisi politik dan sosial di tiap-tiap negara. Dengan keadaan yang seperti ini tentu saja laporan akuntansi pada perusahaan di masing-masing negara juga berbeda (Sadjiarto, 1999). Perbedaan itu mencakup perlakuan atau metode dan pelaporan keuangan. Perbedaan akuntansi tiap negara akan menyulitkan bagi para pengguna laporan keuangan. Tentu saja akan timbul suatu masalah ketika standar akuntansi yang dipakai di negara tersebut berbeda dengan standar akuntansi yang dipakai di negara lain.

Menurut Widaningrum, Praptapa dan Ulfah (2010), permasalahan yang timbul akibat perbedaan standar ini adalah: (1) Investor dan kreditor akan menemui banyak kesulitan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan dengan standar yang berbeda-beda, (2) Perusahaan-perusahaan mengalami

kesulitan jika harus listing di pasar modal negara lain karena harus menyesuaikan laporan keuangannya dengan standar akuntansi setempat, (3) Perusahaan Multinasional (*Multinational Corporation / MNC*) mengalami kesulitan dalam mengkonsolidasi laporan keuangan dari anak-anak perusahaan di negara-negara berbeda. Hal ini menyebabkan perusahaan harus menyusun laporan keuangan ganda. Satu set laporan keuangan yang sesuai dengan standar pelaporan keuangan domestik dan satu set laporan keuangan konsolidasi yang sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang lain yang sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU) Indonesia, bagi perusahaan yang mendaftarkan sahamnya di negara Indonesia, (4) Penyusunan laporan keuangan ganda dapat menimbulkan biaya yang cukup besar dan dapat berindikasi terhadap penyalahgunaan laporan keuangan tersebut.

Guna meminimalisir biaya dalam penyusunan laporan keuangan dan mempermudah para investor dalam membuat keputusan investasi mancanegara maka diperlukanlah suatu standar yang berlaku internasional, seperti standar pelaporan keuangan internasional (*Internasional Financial Reporting Standard – IFRS*) yang disusun oleh *International Accounting Standard Committee (IASC)*. Sehingga dengan adanya standar akuntansi yang bersifat internasional ini dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan laporan keuangan lintas negara (Agustina, 2012).

Terbentuknya IFRS diawali dengan adanya perbedaan yang kompleks antar negara tentang mengatur penyusunan laporan keuangan. Di samping

bertujuan untuk mendamaikan perbedaan namun juga untuk membuat sebuah standar akuntansi yang berlaku secara internasional.

Di setiap negara, penyusunan laporan keuangan memiliki standar dan tahapan berbeda yang ditentukan oleh kalangan profesi yang bergabung dalam sebuah lembaga resmi. Misalnya di Amerika Serikat, terdapat lembaga yang menangani masalah akuntansi dan pelaporannya yaitu *Financial Accounting Standard Board* (FASB) dengan standarnya yang disebut *US GAAP*, Badan Standar Akuntansi Australia dan Badan Standar Pelaporan Keuangan (Australia/Selandia Baru) standarnya GAAP Australia, Badan Standar Akuntansi (Kanada) standarnya GAAP Kanada, *Conseil Nationale de la Comptabilité* (Prancis) standarnya *French GAAP*, Komite Standar Akuntansi Jerman (Jerman), Badan Standar Akuntansi (Inggris) (Choi, 2005:71).

Untuk menyamakan standar dan tahapan dalam membuat laporan keuangan di seluruh dunia, tanggal 29 Juni 1973 didirikan lembaga yang menangani standar dan tahapan laporan keuangan yaitu *International Accounting Standard Committee* (IASC). Lembaga ini kemudian menyepakati *International Accounting Standard* (IAS) yang akan menjadi pedoman *International Financial Reporting Standard* (IFRS) pada tahun 1974.

Pada tahun 2001, Komisi Eropa mengusulkan sebuah aturan yang akan mewajibkan seluruh perusahaan EU yang tercatat sahamnya pada suatu pasar yang diregulasi untuk menyusun akun-akun konsolidasi sesuai dengan IAS selambatnya tahun 2005. *International Accounting Standards Board* (IASB) menggantikan IASC dan mengambil alih tanggung jawabnya per tanggal 1 April

2001. Standar IASB disebut sebagai Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) dan termasuk di dalamnya IAS yang dikeluarkan oleh IASC. Pada 2002, FASB dan IASB sepakat untuk melakukan konvergensi standar akuntansi US GAAP dan IFRS. Langkah itu untuk menjadikan kedua standar tersebut menjadi sesuai (Choi, 2005:62-63).

Memang, hingga saat ini IFRS belum menjadi satu-satunya standar akuntansi di dunia. Namun standar ini telah digunakan oleh lebih dari 150 negara, termasuk Jepang, China, Kanada dan 27 negara Uni Eropa. Selain itu, 85 dari negara-negara tersebut telah mewajibkan laporan keuangan mereka menggunakan IFRS untuk semua perusahaan domestik atau perusahaan yang tercatat. Bagi Perusahaan multinasional atau yang memiliki partner dari Uni Eropa, Australia, Rusia dan beberapa negara di Timur Tengah memang tidak ada pilihan lain selain menerapkan IFRS.

Proses yang panjang tersebut akhirnya menjadi apa yang disebut IFRS, yang merupakan suatu tata cara bagaimana perusahaan menyusun laporan keuangannya berdasarkan standar yang bisa diterima secara global. Jika sebuah negara beralih ke IFRS, artinya negara tersebut sedang mengadopsi bahasa pelaporan keuangan global yang akan membuat perusahaan bisa dimengerti oleh pasar dunia. Hal yang penting dari peralihan ke IFRS bukanlah sekedar pekerjaan mengganti angka-angka di laporan keuangan, tetapi juga mengubah pola pikir dan cara semua elemen di dalam perusahaan (Sadjiarto, 1999). Inilah yang melatarbelakangi perlunya suatu negara melakukan adopsi atau konvergensi IFRS termasuk Indonesia.

Proses konvergensi IFRS di Indonesia sendiri sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2008, setelah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) meresmikan (*grand launching*) program konvergensi IFRS, yaitu prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (*Indonesian GAAP*) dikonvergensi secara penuh dengan IFRS pada tanggal 1 Januari 2012.

Perubahan mendasar dari adopsi terhadap standar akuntansi internasional ini adalah penerapan *principle base* (berdasarkan prinsip-prinsip) dan penggunaan *fair value* (nilai wajar). *Principle base* lebih menekankan pada interpretasi dan aplikasi atas standar, membutuhkan *professional judgement* pada penerapan standar akuntansi, dan membutuhkan penilaian atas substansi transaksi dan evaluasi apakah presentasi akuntansi mencerminkan realitas ekonomi. Dan penggunaan *fair value* yang lebih menekankan pengukuran berdasarkan nilai pasar yang berlaku saat ini (Efritania, 2013).

Di samping itu, sebagai akibat dari adopsi terhadap IFRS adalah perubahan dalam buku-buku akuntansi dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang digunakan di perguruan tinggi yang sudah mengacu pada IFRS. Misalnya saja setelah adopsi terhadap IFRS, PSAK No. 17 (Revisi 1994) tentang Penyusutan, nomor PSAK tersebut tidak berlaku lagi karena pengaturannya disatukan dalam PSAK No. 16 (Revisi 2007) tentang Aset Tetap. Sehingga konsekuensinya, dosen-dosen akuntansi harus belajar lebih banyak lagi mengenai aturan-aturan terbaru dari IFRS (Efritania, 2013).

Dengan diadopsinya IFRS ini sebagai standar akuntansi yang baru maka diperlukan orang-orang yang mengerti tentang ketentuan-ketentuan IFRS, salah

satunya adalah akuntan. Saat ini para akuntan yang telah bekerja pada perusahaan-perusahaan besar dan perbankan berlomba-lomba mempelajari IFRS demi mempertahankan karir mereka. Bahkan sudah ada sebagian kecil perusahaan multinasional yang mensyaratkan “*IFRS capability*” pada *job vacancies* yang mereka buka, artinya perusahaan multinasional ini mensyaratkan para akuntan yang akan bekerja di perusahaan harus menguasai dan mahir dalam penerapan IFRS. Ini membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan mulai membutuhkan akuntan yang memahami IFRS (Utami, 2012).

Penerapan IFRS di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya dilakukan oleh kalangan ekonomi di Indonesia. Padahal penerapan IFRS dalam sistem akuntansi perusahaan akan menjadi salah satu tolak ukur yang menunjukkan kesiapan bangsa Indonesia bersaing di era perdagangan bebas. IFRS saat ini menjadi topik hangat di kalangan ekonomi, khususnya di kalangan akuntan. IAI telah menetapkan tahun 2012 lalu Indonesia sudah mengadopsi penuh IFRS. Di Indonesia sebenarnya sebagian perusahaan sudah mengacu pada IFRS. Karena diharapkan konvergensi IFRS ini nantinya akan dapat meningkatkan kegiatan investasi dan memperkecil *cost of capital* serta meningkatkan transparansi laporan keuangan.

Menurut Rosita Uli Sinaga (dalam situs *Binus University*), status konvergensi IFRS sendiri pada tahun 2014 ini merupakan konvergensi gelombang kedua bagi Indonesia dalam mengadopsi IFRS. Pada konvergensi fase satu (2008-2012), per 1 Desember 2012 DSAK IAI telah menerbitkan : 40 PSAK, 20 ISAK, 11 PPSAK berikut revisi terkait serta 10 PSAK Syariah. Setelah fase satu

berakhir, Indonesia menuju fase kedua (2012-2015). Pada fase ini pun Indonesia belum mengambil keputusan untuk mengadopsi penuh IFRS.

Konvergensi IFRS di Indonesia dilakukan secara bertahap. Adapun manfaat yang diperoleh dari konvergensi IFRS adalah memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan SAK yang dikenal secara internasional, meningkatkan arus investasi global melalui transparansi, menurunkan biaya modal dengan membuka peluang *fund raising* melalui pasar modal secara global, menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan.

Dari uraian di atas kebutuhan Indonesia untuk turut serta melakukan program konvergensi tampaknya sudah menjadi suatu keharusan jika kita tidak ingin tertinggal. Oleh karena persepsi, sikap dan perilaku pemakai laporan keuangan juga bervariasi, sehingga akan sangat menarik untuk menggali persepsi berbagai profesi akuntan mengenai kesiapannya terkait dengan proses konvergensi IFRS di Indonesia. Hal ini yang melatarbelakangi peneliti melakukan penelitian ini.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agustina (2012). Adapun pengembangan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya meneliti tentang perbedaan persepsi antara akuntan pendidik dan akuntan manajemen terhadap konvergensi IFRS di Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini ditambahkan sampel responden lain yaitu akuntan publik. Sehingga penelitian ini akan meneliti tentang perbedaan persepsi antara akuntan pendidik, akuntan manajemen dan akuntan publik terhadap konvergensi IFRS di Indonesia. Selain itu dalam penelitian ini waktu

pengambilan data dari responden lebih terkini yaitu tahun 2015 yang merupakan bagian dari konvergensi IFRS fase kedua di Indonesia.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Apakah terdapat perbedaan persepsi antara akuntan pendidik, akuntan manajemen dan akuntan publik terhadap konvergensi dan dampak penerapan IFRS fase kedua di Indonesia?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti secara empiris tentang perbedaan persepsi antara akuntan pendidik, akuntan manajemen dan akuntan publik terhadap konvergensi dan dampak penerapan IFRS fase kedua di Indonesia.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak antara lain:

1. Bagi para akuntan sebagai bahan pembanding dan pertimbangan dalam menyajikan pelaporan keuangan yang berstandarkan internasional.
2. Bagi peneliti sebagai bahan pembelajaran dalam memahami standar akuntansi internasional sehingga diharapkan dapat membantu peneliti dalam proses adaptasi pada dunia kerja nantinya.

3. Bagi mahasiswa dan dosen sebagai bahan acuan atau literatur dalam menambah wawasan tentang akuntansi yang berstandarkan internasional.

### **1.5 Kontribusi Penelitian**

Kusumawardhani (2011) meneliti tentang perbedaan persepsi Akademisi (Akuntan Pendidik) dan Praktisi (Akuntan Publik) di Indonesia tentang implementasi secara penuh IFRS.

Sedangkan Agustina (2012) meneliti tentang perbedaan persepsi antara akuntan pendidik dan akuntan manajemen terhadap konvergensi IFRS di Indonesia.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agustina (2012). Adapun pengembangan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya meneliti tentang perbedaan persepsi antara akuntan pendidik dan akuntan manajemen terhadap konvergensi IFRS di Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini ditambahkan sampel responden lain yaitu akuntan publik. Sehingga penelitian ini akan meneliti tentang perbedaan persepsi antara akuntan pendidik, akuntan manajemen dan akuntan publik terhadap konvergensi IFRS di Indonesia. Selain itu dalam penelitian ini waktu pengambilan data dari responden lebih terkini yaitu tahun 2015 yang merupakan bagian dari konvergensi IFRS fase kedua di Indonesia.